

**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN MANDIRI**



**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA TONALA KECAMATAN POSIGADAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**OLEH**

**Ketua Tim**

**Dr. UDIN HAMIM, S.Pd,SH, M.Si  
NIP. 197608142002121001**

**Anggota 1**

**SALEH ALHAMID, S.IP.M.A  
NIP. 198603272019031012**

**JURUSAN ILMU HUKUM dan KEMASYARAKATAN  
PROGRAM STUDI PPKn  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGABDIAN MANDIRI**

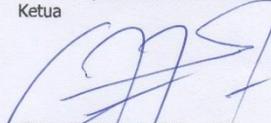
1. Judul Kegiatan : TATA KELOLA PENYELENGGARAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TONALA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2. Lokasi : Desa Tonala
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si
  - b. NIP : 197608142002121001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
  - d. Program Studi/Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan
  - e. Bidang Keahlian :
  - Alamat
  - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082190043891 / udinhamim@yahoo.id.com
  - Alamat
  - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Saleh Al Hamid, S.IP, MA /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 4 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Tonala
  - b. Penanggung Jawab : Yamin Tangahu
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 88,5
  - e. Bidang Kerja/Usaha : -
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 bulan
7. Sumber Dana : Biaya Sendiri
8. Total Biaya : Rp. 4.015.500,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



(Dr. Zuhendra Ngilu, M.Pd)  
NIP. 196705091998032002

Gorontalo, 22 Desember 2020  
Ketua



(Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si)  
NIP. 197608142002121001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)  
NIP. 196105261987031005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat .....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya .....	3
1.3 Metode yang Digunakan .....	4
1.4 Kelompok Sasaran Potensi dan Permasalahannya.....	4
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>7</b>
3.1 Persiapan.....	7
3.2 Pelaksanaan .....	7
3.3 Rencana Keberlanjutan Program .....	8
3.4 Kelayakan Perguruan Tinggi .....	8
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
4.1 Anggaran .....	9
4.2 Jadwal Kegiatan .....	10
4.3 Tempat Kegiatan.....	10
<b>BAB V HASIL YANG TELAH DICAPAI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB VI RENCANA TAHAP SELANJUTNYA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
7.1 Kesimpulan.....	13
7.2 Saran.....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>15</b>

## RINGKASAN

Desa Tonala merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada di wilayah kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantara masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Tonala adalah Tata Kelola Pemerintahan Desa. Ketersediaan sumber daya yang melimpah ruah, namun belum terjamah dengan baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum efektif. Pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik bila pengelolaan pemerintahan desa mengalami masalah. Atas dasar itu, penyusunan tata kelola pemerintahan desa penting untuk dilakukan agar pemerintah desa bisa menerapkan prinsip dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah 1) Penataan Kelembagaan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kelembagaan di tingkat desa. 2) rekomendasi atas pemecahan masalah melalui penataan tata kelola pemerintahan desa yang merujuk pada unsur kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa Tonalo. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah Penyuluhan/sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Tonalo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

***Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintahan Desa, Tonala***

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Deskripsi Potensi Wilayah**

Sejak diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keberadaan desa telah diakui akan eksistensinya dalam aspek ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa telah diberikan hak dan kewenangan penuh dalam mengurus urusan rumah tangga desa tanpa intervensi dari pihak lain. Ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menekankan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Oleh sebab itu, pemerintahan desa dalam menjalankan roda atau sistem pemerintahannya harus lebih fokus pada kepentingan masyarakat setempat. Rujukan bagi pemerintah desa sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UU maupun peraturan teknis lainnya mewajibkan pemerintah desa untuk memprioritaskan beberapa bidang dalam pemerintahan desa, diantaranya, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Diantara empat bidang tersebut menjadi tanggung jawab pebuh pemerintahan desa.oleh sebab itu, patut diakui bahwa hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menjalankan agenda prioritas di desa adalah menyangkut dengan tata kelola pemerintahan desa.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik, prinsip penyelenggaraa pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu indikator dalam menipang kinerja pemerintahan desa.Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan,pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan

tata kelola pemerintahan desa. oleh sebab itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan desa harus menjadi agenda prioritas pemerintahan desa. menyangkut dengan keterlibatan masyarakat, Pasal 68 dan pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa diwajibkan melibatkan masyarakat desa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah Bolaang Mongondow Selatan melalui Peraturan Bupati No 2 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, pasal 5 menyebutkan bahwa, susunan organisasi desa terdiri atas sangadi, sekretariat desa yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan. Dalam pasal tersebut juga menekankan dalam huruf c terdiri dari tiga seksi yakni, pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan serta yang terakhir adalah Kepala dusun. Sementara itu dalam pasal 10 mengatur tentang peran, tugas dan fungsi kinerja BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa.

Berdasarkan pada hal tersebut, tata kelola pemerintahan desa di Desa Tonala melibatkan semua unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. kaitanya dengan hal tersebut, potensi yang dimiliki oleh desa Tonala sangat mendukung keberlanjutan dan pembangunan desa Tonala dalam segi tata kelola pemerintahan desa. Diantara potensi yang dimaksud antara lain adalah :

1. Adanya kewenangan desa dalam mengurus sendiri urusan rumah tangga desa.
2. Adanya struktur pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan desa Tonala.
3. Adanya program pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif

4. Adanya inovasi kegiatan lembaga kemasyarakatan dalam kegotongroyongan dan kesejahteraan keluarga
5. Adanya anggaran dana desa yang sebahagiannya dapat dialokasikan untuk penguatan BumDes;

## **1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Tonalala adalah tata kelola pemerintahan desa yang belum efektif. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, masih terdapat perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kurang aktifnya BPD, lembaga kemasyarakatan termasuk pemuda serta pengelola BumDes merupakan masalah bagi tata kelola pemerintahan desa Tonalala. Kurangnya peran BPD akan menimbulkan permasalahan menyangkut dengan control atau pengawasannya terhadap pemerintahan desa. Pelembagaan dan kelembagaan desa yang kurang berperan akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa. Begitupun sebaliknya, produktifitas ekonomi masyarakat desa tidak akan tumbuh dan berkembang jika BumDes kehilangan fungsi sebagai lembaga yang konsen terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi khususnya Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo mengambil peran dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa Tonalala. Langkah taktis yang akan dilakukan untuk memberikan solusi dan jalan keluar atas masalah yang di hadapi tersebut lewat tindakan aplikatif dan terukur sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Dengan memperhatikan unsur kebutuhan atas masalah yang di hadapi maka, langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penyuluhan/ sosialisasi menyangkut dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### 1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui penyuluhan/ sosialisasi tata kelola pemerintahan desa membutuhkan metode yang relevan dan didasarkan pada persoalan yang sudah diuraikan di atas. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa serta tata kelola pemerintahan di Desa Tonalo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi menyangkut dengan tata kelola pemerintahan di Desa Tonalo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah pemerintah desa beserta perangkat kelembagaan desa lainnya yang berada di desa Tonalo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan agenda yang telah disepakati dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa yaitu penyuluhan dan sosialisasi tentang tata kelola pemerintahan desa

### 1.4. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
1. Tata Kelola Pemerintahan Desa : - Pemerintah Desa - BPD - Lembaga	a. Adanya kewenangan desa dalam mengurus sendiri urusan rumah tangga desa. b. Adanya struktur pemerintahan desa serta lembaga pemsayarakatan desa Tonala. c. Adanya program pembinaan	a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi

<p>Kemasyarakatan</p> <p>- BumDes</p>	<p>lembaga kemasyarakatan desa dan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif</p> <p>d. Adanya inovasi kegiatan lembaga kemasyarakatan dalam kegotongroyongan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>e. Adanya anggaran dana desa yang sebahagiannya dapat dialokasikan untuk penguatan BumDes;</p>	<p>kelembagaan desa dalam penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa</p> <p>c. BumDes belum efektif dari segi pengelolaan</p>
---------------------------------------	---	---

## BAB II

### TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran yang menjadi Indikator suksesnya pengabdian tentang penyuluhan Tata Kelola Pemerintahan Desa adalah :

1. Memetakan masalah menyangkut dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Rekomendasi dan penguatan pemerintahan desa Tonala dalam tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat desa
3. Memahami dan melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* dan kebutuhan masyarakat
4. Menata dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam menopang empat bidak prioritas penyelenggaraan pemerintah desa Tonala
5. Terbentuknya kesadaran bagi komponen kelembagaan desa terhadap partisipasi dalam setiap agenda pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1.Persiapan

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Tonalameliputi :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Tonal
2. Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
3. Persiapan sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi
4. Penyuluhan/ sosialisasi pendidikan politik bagi generasi milenial di DesaKaliyoso

#### 3.2.Pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan/sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Tonal. Dengan demikian maka, sebagai pelaksana program maupun narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Mekanimse dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH M.Si	Aula Kantor Desa Tonal
2	Strategi Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Skala Prioritas Bidang Pembangunan Desa	Saleh Al Hamid, S.IP., M.A	Aula Kantor Desa Tonal

### **3.3. Rencana Keberlanjutan Program**

Keberlanjutan program pengabdian melalui penyuluhan/ sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa akan dilanjutkan dengan proses pendampingan oleh pelaksana program dan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mitra. Dengan demikian maka rencana keberlanjutan program ini adalah melakukan pendampingan dan bersama-sama dengan mitra untuk menata pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa atau BumDes di Desa Tonala.

### **3.4. Kelayakan Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tugas pokok bagi Lembaga Perguruan Tinggi, dimana pengabdian masyarakat adalah bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka selain pengabdian yang dilakukan melalui dana PNBPFIS, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn juga menginisiatif untuk melaksanakan pengabdian mandiri setiap tahun yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Artinya kelayakan pengabdian mandiri yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Prodi. PPKn adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB IV**  
**JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN**

**4.1. Anggaran Biaya**

**REKAPITULASI ANGGARAN PKL**

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A.</b>	<b>Honorium</b>				
	Honor Pemateri untuk 1 kali kegiatan	2	Org	750.000	1.500.000
<b>Sub Total A</b>					<b>1.500.00</b>
<b>B</b>	<b>Bahan Habis Pakai dan Peralatan</b>				
	Spanduk	1	Buah	250.000	250.000
	Pembelian Kertas HVS A4 70 gram	1	Rim	35.000	35.000
	Konsumsi Berat	40	Org	20.000	800.000
	Konsumsi ringan	40	Org	10.000	400.000
<b>Sub Total B</b>					<b>1.485.000</b>
<b>C</b>	<b>Perjalanan</b>				
	Survey awal	1	Mobil	250.000	250.000
	Pelaksanaan kegiatan	1	Mobil	250.000	250.000
<b>Sub Total C</b>					<b>500.000</b>
<b>D</b>	<b>Lain-lain:</b>				
	Penyusunan Proposal	25	Lbr	1500	37.500
	Penggandaan Proposal 4 eks	100	Lbr	250	25.000
	Penjilidan Proposal	4	Eks	4.500	18.000
	Penggandaan materi penyuluhan 40 orang x 15 hal	600	Lbr	250	150.000

	Pembuatan Laporan			300.000	300.000
<b>Sub Total D</b>					<b>530.500</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>4.015.500</b>			

#### 4.2 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan ini di mulai dari tahap persiapan pada minggu ketiga bulan agustus 2020, Koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait pada minggu pertama bulan oktober 2020, tahap pelaksanaan sosialisasi pada minggu ketiga bulan Oktober 2020 dan tahap penyusunan laporan pada minggu ketiga bulan November 2020. Jadwal kegiatan di uraikan di bawah ini:

***Tabel Jadwal Kegiatan Program***

1	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		AGUSTUS		OKTOBER		NOVEMBER	
		MINGGU		MINGGU		MINGGU	
		II	IV	I	III	III	IV
2	Persiapan						
3	Koordinasi dengan pemerintah desa						
4	Pelaksanaan sosialisasi						
5	Laporan						

#### 4.3 Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Kantor Desa Tonalo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **BAB V**

### **HASIL YANG TELAH DICAPAI**

Tata kelola penyelenggaraan organisasi pemerintah desa merupakan bagian dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip *good governance* dan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh sebab itu tata kelola pemerintahan desa meliputi Pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum sepenuhnya menyelenggarakan tata kelola dengan baik. Diantara masalah yang dihadapi adalah kurang efektifnya hubungan antara pemerintahan desa dengan BPD beserta perangkat kelembagaan desa lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa Tonala. Atas masalah tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pengabdian ini meliputi :

1. Telah terbangun hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa Tonala
2. Terciptanya kesadaran dari masing-masing lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap fungsi, tugas dan wewenang bagi perangkat desa termasuk pemerintah desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAP SELANJUTNYA**

Berdasarkan pada capain hasil pengabdian yang dilaksanakan di desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, rekomendasi dalam pengabdian ini meliputi :

- a. Perlu adanya penguatan melalui pelatihan tata kelola pemerintahan desa berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Melalui pemerintah desa Tonala, menginsiatif pengelolaan sumber daya tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan dan pelatihan tata kelola pemerintahan desa meliputi apartur pemerintahan desa, lembaga BPD dan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Sekelumit tulisan mengenai tata kelola penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa yang di tinjau dari pendekatan normatif dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa terutama tercapainya tertib administrasi pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tercapainya pelayanan prima di tingkat perdesaan akan sangat tergantung kepada para pelaku pemerintahan desa sebagai masyarakat terpilih yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk mengendalikan roda pemerintahan. Oleh karena itu di perlukan kesungguhan dalam penerapan pedoman dan peraturan perundang undangan yang di bentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

#### **7.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan pengabdian ini meliputi :

1. Masyarakat harus tetap menghargai penyelenggaraan organisasi pemerintahan Desa meskipun belum berjalan sesuai dengan apa yang.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuwan sosial untuk memanfaatkan hasil ini sebagai wawasan pengetahuan mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa Tonala kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI,  
*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Bupati No 2 Tahun 2018 tentang susuna organisasi dan tata kerja  
pemerintahan desa,

LAMPIRAN :

**Biodata Ketua Tim**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	<b>Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si</b>
2	Tempat dan Tanggal Lahir	Tidore, 14 Agustus 1976
3	NIP	197608142002121001
4	Pangkat/Golongan	Lektor Kepala/ Iva
5	Bidang Keahlian	Pemerintahan Daerah
6	Agama	Islam
7	Status	Menikah
8	Alamat Rumah	Jln. Jakarta. Blok G. Nomor 2 Kelurahan Dulalowo Kota Tengah
9	Nomor HP	082190043891
1.13	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo 96128 Indonesia
1.14	Nomor Telepon/Faks	0435 827038, Fax 0435 827038
1.15	Alamat e-mail	<a href="mailto:udinhamim@yahoo.co.id">udinhamim@yahoo.co.id</a>

**I. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

1. Sekolah Dasar Negeri Mafututu, tamat tahun 1990
2. Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Soa Sio, tamat tahun 1993
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Soa-Sio, tamat tahun 1996
4. S1 jurusan PP-Kn IKIP Negeri Gorontalo, lulus tahun 2001
5. S1 Jurusan Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) "Sunan Giri" Malang lulus tahun 2012
6. S2 jurusan Ilmu Politik UGM Yogyakarta, lulus tahun 2006
7. S3 Ilmu Administrasi Publik Kons. SDM Aparatur Pemerintah Daerah Perspektif *Capacity Building*, Unibraw Malang, lulus tahun 2010

**II. RIWAYAT JABATAN di Universitas Negeri Gorontalo**

1. Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial tahun 2003
2. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial tahun 2006 - 2007

3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial tahun 2010 – 2011
4. Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo tahun 2011 sampai dengan sekarang
5. Direktur Pusat Pengembangan Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2011- 2014

### III. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Judul Karya Ilmiah	Status	Tahun
1	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada masyarakat local dalam Perspektif Integrasi Nasional	Ketua Peneliti	2012
2	Implementasi Kebijakan empat Pilar UNG	Ketua Penelitian	2014
3	Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam akselerasi akreditasi program studi dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo	Ketua Peneliti	2015

### IV. KARYA ILMIAH (JURNAL) YANG TELAH DI HASILKAN

No.	Judul Karya Ilmiah	Penerbit	Tahun
1	Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Local Governance	Vol.2 No.2. ISSN 1979-5955	2009
2	Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Era Otonomi Daerah	Vol. 2 No. 5 ISSN 1979-5262	2009
3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance	2 N0. 4 ISSN 1979-5262	2010
4	Apparatus Resources Development Model in Capacity Building Perspective (study at Bone Bolango Regency	Jurnal Aplikasi Manajemen terakreditasi Dikti. JAM, Volume 9 No. 02,	2011

	Government of Gorontalo Province	Maret 2011 ISSN : 1693 -5241	
--	-------------------------------------	---------------------------------	--

## VI. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksana	
7	2012	Pemateri pada Dialog partai Politik se Provinsi Gorontalo “ harmonisasi antara pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi	Sekretariat Daerah provinsi Gorontalo	
8	2012	Pemateri pada sosialisasi Budaya dan etika politik se provinsi Gorontalo “ Demokrasi dan system pemerintahan Indonesia”	Badan Kesbangpo provinsi Gorontalo	
9	2012	Pemateri pada kegiatan Dialog tentang Sinergitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi	STIM Boalemo	
10	2012	Narasumber pada dialog Bandayo Lipuu dengan tema Menuju Kabupaten Bone Bolango lebih Maju	TVRI Gorontalo	
11	2012	Narasumber pada dialog Bandayo Lipuu dengan tema Restrukturisasi birokrasi di tubuh Polri	TVRI Gorontalo	
12	2012	Narasumber pada dialog Bandayo Lipuu dengan tema Dinamika penetapan RPJMD dan masa depan pembangunan Gorontalo	TVRI Gorontalo	
13	2012	Narasumber pada dialog Bandayo Lipuu dengan tema Keputusan WDP dan masa depan pembangunan provinsi Gorontalo	TVRI Gorontalo	
14	2012	Narasumber pada wawancara acara pelangi Nusantara siaran secara nasional dengan tema Kebijakan Agropolitan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo	TVRI Gorontalo	

15	2012	Narasumber pada dialog Publik dengan tema Urgensi Sumpah Pemuda terhadap pemuda masa kini	LSM Pilar Bangsa	
16		Narasumber pada dialog public dengan tema “menciptakan situasi politik	LSM Pilar Bangsa	
17	2013	Narasumber pada dialog publik dengan tema demokrasi versus Demokrasi liberal	LSM Pilar Bangsa	
18	2013	Narasumber pada dialog publik dengan tema Esensi Politik yang bermartabat	LSM Pilar Bangsa	
19	2013	Narasumber pada dialog publik dengan tema Kebangkitan Nasional sebagai momentum kebangkitan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan	LSM Pilar Bangsa	
20	2013	Narasumber pada dialog publik dengan tema Repleksi Sumpah Pemuda 1928 dengan kondisi pemuda masa kini	LSM Pilar Bangsa	
21	2014	Narasumber pada dialog publik dengan tema membangkitkan kembali budaya gotong royong yang semakin pudar	LSM Pilar Bangsa	
22	2014	Narasumber pada dialog publik dengan tema kebhinekaan merupakan kekayaan suku, budaya, agama, aliran kepercayaan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia	LSM Pilar Bangsa	
23	2015	Narasumber pada dialog publik dengan tema tantangan dan solusi generasi muda menyongsong persaingan masyarakat ekonomi ASEAN/Global	LSM Pilar Bangsa	
24	2015	Narasumber pada dialog publik dengan tema Kebhinekaan dan Wawasan Nusantara	LSM Pilar Bangsa	
25	2015	Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dengan judul materi Dinamika Politik Dalam Membangun	KESBANGPOL Provinsi	

		Demokrasi		
26	2015	Narasumber Pada Kegiatan Forum Dialog Mengantisipasi Konflik Politik judul materi Desain dan Bentuk Manajemen Konflik	KESBANGPOL Provinsi	
27	2015	Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi dengan tema Peningkatan Kesadaran Bela Negara	LSM Pilar Bangsa	
28	2015	Narasumber pada Kajian Perkembangan Situasi Politik di Provinsi Gorontalo	KESBANGPOL Provinsi	
29	2016	Narasumber pada Kegiatan dengan Tema " Hari Kebangkitan Nasional sebagai Momentum Menggerakkan Potensi Generasi Muda dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa"	LSM Pilar Bangsa	

## VII Mengikuti Kegiatan Ilmiah (Seminar)

No.	Kegiatan	Pelaksana	Tahun
1	Pemateri pada Seminar Nasional " Empat Pilar Bangsa"	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	2012
2	Penghargaan terhadap Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada diesnatalis ke 49 Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	2012
3	Narasumber pada kegiatan lokakarya dan diskusi terarah tata kelolah pemerintahan provinsi	Kemitraan Partnership Indonesia	2013
4	<i>Participant</i> pada kegiatan <i>Symposium On Constitutional Complaint</i>	<i>Chief Justice Of The Constitutional Court Of The of Indonesia</i>	2015
5	Pemateri Seminar Budaya "Bergandengan Tangan sehati, sejiwa merajut persaudaraan antar etnis	KESBANGPOL Kabupaten Pohuwato	2015

	dan umat beragama”		
6	Temu Pakar dengan tema Implementasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	MPR RI	2015
7	Pemateri Sosialisasi Tema Etika dan Budaya Politik (Dinamika Politik dalam membangun Demokrasi)	Kespangpol Provinsi Gorontalo	2015
8	Narasumber pada forum dialog masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi konflik Politik dengan Tema Desain dan Bentuk Manajemen Konflik	Kespangpol Provinsi Gorontalo	2015
9	Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Etika dan Budaya Politik berbasis lokal	Kespangpol Provinsi Gorontalo	2016
10	Peserta Focus Group Discussion Lembaga Pengkajian di Daerah	MPR RI	2016
11	Peserta Dialog Mengawal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang Demokratis, Bermartabak dan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Lokal Gorontalo	Kespangpol Provinsi Gorontalo	2016

## IX PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2012	<i>Soft Skill</i> bagi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo	83	Reviva Cendekia Jogjakarta
2	2011	Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi	240	UNG Press
3	2012	Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo	168	Pustaka Indonesia

			Press
4	2015	Sekretaris Forum Fasilitasi Penyelesaian Konflik Politik di Provinsi Gorontalo tahun 2015	Kespangpol Provinsi Gorontalo
5	2016	Ketum Tim Pembentukan Forum Fasilitasi Penyelesaian Konflik Politik di Provinsi Gorontalo Tahun 2016	Kespangpol Provinsi Gorontalo

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengabdian masyarakat biaya mandiri tahun 2020.

Gorontalo, .....September 2020

Yang Membuat Pernyataan,

**Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH.,M.Si**  
NIP. 197608142002121001

**A. Identitas Anggota**

1.	Nama	Saleh Al Hamid, S.IP., M.A
2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3.	NIP	198603272019031012
4.	NIDN	0927038601
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Gorontalo, 27 Maret 1986
6.	Alamat Rumah	Jl. Lupoyo Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
7.	No. Telpn	085254600700
8.	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kel. Dulalowo Kota Gorontalo
9.	Alamat e-mail	<a href="mailto:salehalhamid@ung.ac.id">salehalhamid@ung.ac.id</a>

**B. Riwayat Pendidikan**

NO.	TAHUN		JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA LEMBAGA	TEMPAT
	MASUK	KELUAR				
1.	1993	1998	SD	-	SDN 1 Ipilo	Desa Ipilo Kec. Atinggola
2.	1998	2001	SLTP	-	SMP NEGERI 2 Atinggola	Desa Gentuma Kec. Atinggola
3.	2001	2004	SLTA	IPS	MAN MODEL KOTA GORONTALO	Kota Gorontalo
4.	2004	2008	Sarjana (S1)	Ilmu Pemerintahan	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo
5.	2013	2016	Magister (S2)	Politik dan Pemerintahan	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM)	Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**C. Pengalaman Penelitian**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp.)

1.	2015	Relasi Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	Mandiri	
2.	2017	Survei Peta Potensi Ekonomi di 123 Desa Gorontalo Utara	APBD	

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Kegiatan	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp.)
1.	2018	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di 123 Desa Kabupaten Gorontalo Utara	APBD Gorontalo Utara	
2.	2019	Enumerator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2019	APBN	
3.	2020	Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Kwandang	APBD	

Semua data yang dicantumkan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko. Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian kolaboratif dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal.

Gorontalo, September 2020

Yang Menyatakan

**Saleh Al Hamid, S.IP., M.A**  
**NIP.198603272019031012**

## SURAT PERNYATAAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamin Tangahu  
Alamat : Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Jabatan : Kepala Desa

Dalam rangka rencana pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Bapak Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si dan Bapak Saleh Alhamid, S.IP, M.A dengan tema "Tata Kelola Penyelenggaraan Organisasi Pemerintahan Desa" yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020, maka dengan ini saya selaku Kepala Desa Tonala menyatakan dukungan sepenuhnya pada kegiatan tersebut. Adapun dukungan yang kami berikan dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan berupa peserta, tempat dan alat yang dibutuhkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun

Tonala, ... Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan



Yamin Tangahu

## DOKUMENTASI KEGIATAN

